

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	8
1.3. Tujuan Penulisan.....	9
1.3.1. Tujuan Umum.....	9
1.3.2. Tujuan Khusus.....	9
1.4. Definisi Operasional.....	10
1.5. Metode Penulisan.....	11
1.5.1. Jenis Penelitian.....	11

1.5.2.	Sumber dan Pengumpulan Data.....	12
1.5.3.	Analisis Data.....	12
1.6.	Sistematika Penulisan.....	13
Bab II	Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Korupsi.....	13
Bab III	Pembebasan Bersyarat.....	14
Bab IV	Analisa Pemberian Pembebasan Bersyarat Atas Nama Dra. Hj. Hatiyatul Malichah (Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.PK.01.05.06 Tahun 2013).....	14
Bab V	Penutup	14
BAB II	TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	15
2.1.	Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus.....	15
2.2.	Tindak Pidana Korupsi.....	28
BAB III	PEMBEBASAN BERSYARAT.....	44
3.1.	Pengertian Pembebasan Bersyarat.....	44
3.2.	Pembebasan Bersyarat Untuk Tindak Pidana Umum.....	51
3.2.1.	Syarat Pembebasan Bersyarat Untuk Tindak Pidana Umum.....	51
3.2.2.	Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Didik Pemasarakatan.....	54

3.3.	Pembebasan Bersyarat Untuk Tindak Pidana Korupsi.....	55
3.4.	Pembebasan Bersyarat Untuk Tindak Pidana Tertentu Lainnya.....	62
3.5.	Aturan Tambahan Mengenai Pembebasan Bersyarat.....	70
3.6.	Asimilasi Sebagai Salah Satu Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi.....	76
BAB IV	ANALISA PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT ATAS NAMA NARAPIDANA DRA. HJ. HATIYATUL MALICHAH (KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH- 06.PK.01.05.06 TAHUN 2013).....	83
4.1.	Pengetatan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi.....	83
4.2.	Analisa Latar Belakang diubahnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.....	90
4.3.	Duduk Perkara.....	98
4.4.	Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-06.PK.01.05.06 TAHUN 2013.....	102
4.5.	Analisa <i>Pemenuhan Syarat-Syarat Pemberian Pembebasan</i>	106

Bersyarat Dalam Berkas Usulan Pembebasan Bersyarat

Narapidana Dra. Hj. Hatiyatul Malichah

BAB V	PENUTUP.....	121
	5.1. Kesimpulan.....	121
	5.2. Saran.....	123
	DAFTAR PUSTAKA.....	125
	DAFTAR LAMPIRAN.....	129
	LAMPIRAN.....	133